



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-190/P.01/DL.02/02/2023 Jakarta, 1 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Jadwal dan Tata Kelola Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi Pejabat Fungsional Perencana (PFP)

Yth.

1. Kepala Biro Perencanaan/Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga (Pusat)
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Daerah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional khususnya dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2), serta dalam rangka Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Kementerian PPN/Bappenas selaku Instansi Pembina JFP bertanggung jawab dalam melakukan penilaian angka kredit atas kinerja Pejabat Fungsional Perencana (PFP) yang instansinya belum memiliki Tim Penilai baik di Pusat maupun Daerah dan Pejabat Fungsional Perencana Ahli Utama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pusbindiklatren sebagai Instansi Pembina JFP menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jadwal penyerahan penilaian angka kredit keluaran kinerja JFP periode 1 Januari - 31 Desember Tahun 2022 paling lama sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai Pusat pada tanggal 10 April 2023 sedangkan untuk batas waktu penilaian angka kredit keluaran kinerja JFP mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pasal 58 ayat (2) yaitu hingga Tanggal 30 Juni Tahun 2023;
2. Keluaran kinerja Perencana dinilai berdasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Lampiran SKP Tahun 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
3. Tata cara pengumpulan dan penilaian angka kredit JFP mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Peraturan Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/ Sestama Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana;
4. Pengumpulan dan penilaian dokumen keluaran kinerja perencana (angka kredit) sebagaimana angka 2 dan 3 semuanya menggunakan Aplikasi Penilaian Kinerja Perencana (SIKEREN);

5. Tata...

5. Tata cara pengusulan dan penilaian dokumen keluaran kinerja Perencana (angka kredit) melalui aplikasi SIKEREN mengacu pada Surat Edaran Kepala Pusbindiklatren Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Pengumpulan dan Penilaian Dokumen Penilaian Kinerja JFP;
6. Bagi instansi pengguna yang telah memiliki tim penilai instansi tetap dapat melakukan penilaian dengan menggunakan aplikasi SIKEREN meskipun anggota tim penilai belum memiliki sertifikat sebagai tim penilai angka kredit dengan tetap mempertimbangkan kemampuan menilai dokumen keluaran kinerja JFP sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022;
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional khususnya dalam Pasal 57 ayat (1) dinyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing-masing, disesuaikan ke dalam Angka Kredit Kumulatif berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2023" sehingga diharapkan seluruh instansi pengguna dapat melaksanakan amanat sebagaimana dimaksud;
8. Angka Kredit Kumulatif hasil penilaian angka kredit Juni 2023 yang dijumlahkan dengan angka kredit kumulatif tahun sebelumnya dituangkan di dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan format sebagaimana yang akan diatur di dalam petunjuk teknis Badan Kepegawaian Negara;
9. Penilaian kinerja JFP periode 1 Januari - 31 Desember Tahun 2023 sudah menggunakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
10. Ketentuan sebagaimana diatur dalam 1 - 9 juga berlaku bagi instansi pengguna yang telah memiliki tim penilai angka kredit instansi masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Plt.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
5. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.



Lampiran : Daftar Pengguna JFP

Nomor : B-190/P.01/DL.02/02/2023

Tanggal : 1 Februari 2023

Yth.:

I. KEPALA BIRO PERENCANAAN/KEPEGAWAIAN/SDM/ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA (PUSAT) :

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKAMLA)
6. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
14. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
15. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
16. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
17. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
18. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
19. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
21. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
22. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
23. Badan Pusat Statistik (BPS)
24. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
25. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
26. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
27. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
28. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
29. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
30. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
31. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
32. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
33. Kejaksaan Agung

34. Kementerian Agama
35. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
36. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
37. Kementerian Dalam Negeri
38. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
39. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
40. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
41. Kementerian Keuangan
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan
43. Kementerian Kesehatan
44. Kementerian Ketenagakerjaan
45. Kementerian Komunikasi dan Informatika
46. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
47. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
48. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
49. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
50. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
51. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
52. Kementerian Luar Negeri
53. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
54. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
55. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia
56. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
57. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
58. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
59. Kementerian Perdagangan
60. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
61. Kementerian Perhubungan
62. Kementerian Perindustrian
63. Kementerian Pertahanan
64. Kementerian Pertanian
65. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
66. Kementerian Sekretariat Kabinet
67. Kementerian Sekretariat Negara
68. Kementerian Sosial
69. Kepolisian Republik Indonesia
70. Komisi Pemilihan Umum
71. Komisi Yudisial
72. Mahkamah Konstitusi
73. Ombudsman Republik Indonesia

74. Perpustakaan Nasional
75. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
76. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
77. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
78. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)

II. KEPALA BKD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (DAERAH):

1. Provinsi Aceh

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhan Batu
- 2.8. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhan Batu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias

- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunung Sitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematang Siantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjung Balai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

3. Provinsi Sumatera Barat

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

4. Provinsi Riau

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar

- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Singingi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

5. Provinsi Kepulauan Riau

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

6. Provinsi Jambi

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

7. Provinsi Bengkulu

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Kaur
- 7.5. Kabupaten Kepahiang
- 7.6. Kabupaten Lebong
- 7.7. Kabupaten Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

8. Provinsi Sumatera Selatan

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin

- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuk Linggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Kota Prabumulih

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

10. Provinsi Lampung

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran
- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro

11. Provinsi Banten

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang
- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

12. Provinsi Jawa Barat

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi
- 12.4. Kabupaten Bogor
- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Karawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

14. Provinsi Jawa Tengah

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara

- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemalang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

15. Provinsi Jawa Timur

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo



- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunungkidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

17. Provinsi Bali

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

20. Provinsi Kalimantan Barat

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Mempawah
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru

- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin**

22. Provinsi Kalimantan Tengah

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangkaraya

23. Provinsi Kalimantan Timur

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

24. Provinsi Kalimantan Utara

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

25. Provinsi Gorontalo

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

26. Provinsi Sulawesi Selatan

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Bau Bau
- 27.17. Kota Kendari

28. Provinsi Sulawesi Tengah

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan

- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Tolitoli
- 28.13. Kota Palu

29. Provinsi Sulawesi Utara

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

30. Provinsi Sulawesi Barat

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Mamasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

31. Provinsi Maluku

- 31.1. Kabupaten Buru
- 31.2. Kabupaten Buru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

32. Provinsi Maluku Utara

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Halmahera Selatan
- 32.6. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.7. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.8. Kabupaten Pulau Taliabu
- 32.9. Kota Ternate
- 32.10. Kota Tidore Kepulauan

33. Provinsi Papua

- 33.1. Kabupaten Asmat
- 33.2. Kabupaten Biak Numfor
- 33.3. Kabupaten Boven Digoel
- 33.4. Kabupaten Deiyai
- 33.5. Kabupaten Dogiyai
- 33.6. Kabupaten Intan Jaya
- 33.7. Kabupaten Jayapura
- 33.8. Kabupaten Jayawijaya
- 33.9. Kabupaten Keerom
- 33.10. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.11. Kabupaten Lanny Jaya
- 33.12. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.13. Kabupaten Memberamo Tengah
- 33.14. Kabupaten Mappi
- 33.15. Kabupaten Merauke
- 33.16. Kabupaten Mimika
- 33.17. Kabupaten Nabire
- 33.18. Kabupaten Nduga
- 33.19. Kabupaten Paniai
- 33.20. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 33.21. Kabupaten Puncak
- 33.22. Kabupaten Puncak Jaya
- 33.23. Kabupaten Sarmi
- 33.24. Kabupaten Supiori
- 33.25. Kabupaten Tolikara
- 33.26. Kabupaten Waropen
- 33.27. Kabupaten Yahukimo
- 33.28. Kabupaten Yalimo
- 33.29. Kota Jayapura

34. Provinsi Papua Barat

- 34.1. Kabupaten Fakfak
- 34.2. Kabupaten Kaimana
- 34.3. Kabupaten Manokwari
- 34.4. Kabupaten Manokwari Selatan

- 34.5. Kabupaten Maybrat
- 34.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 34.7. Kabupaten Raja Ampat
- 34.8. Kabupaten Sorong
- 34.9. Kabupaten Sorong Selatan
- 34.10. Kabupaten Tambrau
- 34.11. Kabupaten Teluk Bintuni
- 34.12. Kabupaten Teluk Wondama
- 34.13. Kota Sorong